

Perselisihan dan Faktor Ekonomi sebagai Prediktor Dominan Perceraian di 34 Provinsi Indonesia: Analisis Regresi Berganda dan ANOVA Data BPS 2025

Setriyani¹, Nurul Latifa², Muhammad Z. A. Kadir³, Heiza R. Pratama⁴, Ammara FanySarahman⁵, Fahrul Agus⁶

^{1,2,3,4,5,6}Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman Kampus Gunung Kelua, Jalan Sambaliung No. 9, Samarinda 75119, Kalimantan Timur, Indonesia

Email Penulis Korespondensi*: setriyani@student.unmul.ac.id

Abstrak— Perceraian di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang berdampak pada ketahanan keluarga, tumbuh kembang anak, dan stabilitas ekonomi rumah tangga, namun sebagian besar kajian terdahulu masih terbatas pada lingkup satu wilayah dan satu metode analisis sehingga sulit digeneralisasi secara nasional. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor dominan penyebab perceraian di 34 provinsi Indonesia dan merumuskan rekomendasi kebijakan pencegahan berbasis data. Data sekunder resmi mencakup 13 faktor penyebab perceraian dari 34 provinsi dianalisis menggunakan Korelasi Pearson, Regresi Linear Sederhana, Regresi Linear Berganda, ANOVA One-Way, dan ANOVA Two-Way. Hasil analisis menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan faktor paling dominan ($r = 0,9844$; $R^2 = 0,9690$), diikuti faktor ekonomi ($r = 0,9794$; $R^2 = 0,9592$); ketika kedua faktor dimodelkan bersama, regresi berganda menghasilkan $R^2 = 0,9985$ dan Adjusted $R^2 = 0,9984$. ANOVA One-Way menunjukkan perbedaan rata-rata perceraian yang signifikan antarwilayah ($F = 4,8451$; $p = 0,004$), dengan Jawa Barat tercatat sebagai provinsi kasus tertinggi (98.903 kasus) dan Nusa Tenggara Timur terendah (494 kasus). Temuan ini menyimpulkan bahwa pencegahan perceraian di Indonesia perlu difokuskan pada program mediasi pernikahan, penguatan ekonomi keluarga, dan konseling pra-nikah yang dirancang sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Kata Kunci: Faktor Sosial Ekonomi Keluarga, Data Sekunder BPS, Kebijakan Ketahanan Keluarga, Analisis Multivariat, Ketimpangan Antarwilayah

Abstract— Divorce rates in Indonesia have risen steadily, affecting family stability, children's well-being, and household economic conditions, yet most prior studies remain confined to a single region or a single method, limiting their generalizability at the national level. This study aims to identify the dominant factors driving divorce across 34 Indonesian provinces and to propose evidence-based prevention policies. Official secondary data covering 13 divorce-related factors across 34 provinces were analyzed using Pearson Correlation, Simple Linear Regression, Multiple Linear Regression, One-Way ANOVA, and Two-Way ANOVA. The results show that continuous marital conflict is the strongest predictor ($r = 0.9844$; $R^2 = 0.9690$), followed by economic hardship ($r = 0.9794$; $R^2 = 0.9592$); combined in a multiple regression model, these two factors yield $R^2 = 0.9985$ and Adjusted $R^2 = 0.9984$. One-Way ANOVA revealed statistically significant differences in average divorce rates across regions ($F = 4.8451$; $p = 0.004$), with West Java recording the highest number of cases (98,903) and East Nusa Tenggara the lowest (494). These findings indicate that divorce-prevention efforts in Indonesia should prioritize marital mediation programs, family economic empowerment, and pre-marital counseling tailored to each region's characteristics.

Keywords: Family Socioeconomic Factors, BPS Secondary Data, Family Resilience Policy, Multivariate Analysis, Regional Disparity

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan sakral antara suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng, sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Di Indonesia, fenomena ini terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mencatat total 438.168 perkara perceraian di seluruh Indonesia, dengan cerai gugat (gugatan istri) mendominasi sebanyak 346.516 kasus (79,1%) dan cerai talak (talak suami) sebanyak 91.652 kasus (20,9%) [1]. Angka ini menjadi sinyal bahwa persoalan perceraian perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

Secara geografis, sebaran kasus perceraian antar provinsi sangat timpang. Jawa Barat mencatat angka tertinggi dengan 98.903 kasus, diikuti Jawa Timur (83.208 kasus) dan Jawa Tengah (67.500 kasus). Di sisi lain, Nusa Tenggara Timur hanya mencatat 494 kasus—selisih hampir 200 kali lipat dibanding Jawa

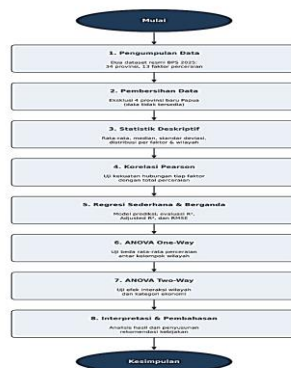
Barat. Ketimpangan yang sangat besar ini menunjukkan bahwa faktor demografis, sosial, dan ekonomi di masing-masing daerah turut berperan dalam membentuk pola perceraian di Indonesia [1].

Penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena perceraian dari berbagai perspektif. Muhajannah dkk. (2025) menerapkan regresi linear sederhana pada data 35 kabupaten/kota Jawa Tengah dan menghasilkan $R^2 = 0,8774$, membuktikan hubungan positif antara jumlah pernikahan dan tingkat perceraian [2]. Purwaningsih dan Nurelarsi (2023) menggunakan K-Means Clustering dengan Davies Bouldin Index pada data Jawa Barat, menemukan bahwa ketidakharmonisan dan masalah ekonomi mendominasi kluster penyebab perceraian [3]. Samosir dkk. (2021) menerapkan regresi linear berganda di Pengadilan Agama Simalungun dan berhasil memprediksi 961 kasus perceraian untuk tahun 2019 [4]. Irwan dkk. (2023) menggunakan regresi logistik biner pada data Kabupaten Pinrang dan membuktikan bahwa faktor ekonomi merupakan variabel yang berpengaruh secara parsial dengan odds ratio 2,069 [5]. Sejalan dengan itu, Manna dkk. (2021) menemukan bahwa dominasi cerai gugat di Indonesia berkaitan erat dengan meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan [6], sementara Khairuddin (2024) melalui studi literatur mengidentifikasi bahwa pernikahan usia muda, ketidakcukupan ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan faktor-faktor yang paling sering berulang sebagai penyebab meningkatnya angka perceraian di Indonesia [7].

Meski penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang berarti, cakupannya masih terbatas. Hampir semua studi hanya mengkaji satu wilayah—satu kabupaten, satu pengadilan, atau satu provinsi—sehingga hasilnya sulit diterapkan secara nasional. Belum ada penelitian yang secara khusus menggunakan data BPS 2025 untuk menganalisis pola perceraian di seluruh 34 provinsi Indonesia sekaligus melihat perbedaannya antar wilayah. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada satu atau dua metode analisis saja, tanpa mengombinasikan pendekatan korelasi, regresi, dan ANOVA secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Keterbatasan ini menyebabkan pemahaman tentang dinamika perceraian di tingkat nasional masih belum memadai, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pun cenderung bersifat lokal dan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh wilayah Indonesia [8][9]. Di sinilah letak kesenjangan (gap) penelitian yang coba diisi oleh studi ini: belum ada penelitian yang secara khusus menggunakan data BPS 2025 untuk menganalisis pola perceraian di seluruh 34 provinsi Indonesia sekaligus menguji perbedaan dan efek interaksi antarwilayah. Kesenjangan penelitian ini menjadi semakin relevan mengingat kondisi perceraian di Indonesia terus mengalami dinamika yang signifikan. Tren perceraian nasional menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir, dengan total kasus di seluruh Indonesia mencapai ratusan ribu per tahun. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas, termasuk terhadap kondisi psikologis anak, stabilitas ekonomi keluarga, dan beban sistem peradilan agama [2][4]. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, terdapat 13 faktor resmi penyebab perceraian yang dicatat di seluruh pengadilan agama, di antaranya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami, mabuk, madat, judi, zina, murtad, kawin paksa, cacat badan, dan dihukum penjara [1]. Dari keseluruhan faktor tersebut, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta faktor ekonomi secara konsisten mendominasi angka perceraian di hampir seluruh provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan relasional dan tekanan finansial merupakan dua dimensi utama yang melatarbelakangi keputusan pasangan untuk bercerai di Indonesia. Dari sisi distribusi geografis, pola perceraian di Indonesia tidak merata. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa secara historis mencatatkan angka perceraian jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi di luar Jawa, sebagian karena kepadatan penduduk yang lebih besar dan akses yang lebih mudah ke pengadilan agama [10]. Namun demikian, belum diketahui secara empiris apakah perbedaan antarwilayah ini juga dimoderasi oleh intensitas faktor ekonomi, atau apakah faktor ekonomi berpengaruh secara merata di semua wilayah. Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu motivasi utama penelitian ini. Sebagai novelty, penelitian ini menggabungkan Korelasi Pearson, Regresi Linear Sederhana, Regresi Linear Berganda, serta ANOVA One-Way dan Two-Way secara sekaligus pada data resmi seluruh 34 provinsi Indonesia tahun 2025 -- kombinasi metode dan cakupan wilayah yang belum ditemukan pada studi-studi terdahulu yang telah diuraikan di atas. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi faktor penyebab perceraian dominan di 34 provinsi Indonesia berdasarkan data BPS 2025; (2) menganalisis hubungan antara faktor perselisihan dan faktor ekonomi terhadap total perceraian menggunakan regresi linear sederhana dan berganda; dan (3) menguji perbedaan pola perceraian antarwilayah serta efek interaksi wilayah dan faktor ekonomi menggunakan ANOVA One-Way dan Two-Way. Dengan pendekatan analisis multivariat berbasis data nasional ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan pencegahan perceraian yang tepat sasaran di tingkat nasional maupun regional.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tahapan Penelitian



Gambar 1. Diagram alur tahapan penelitian

Penelitian ini mengikuti alur sistematis yang terdiri atas delapan tahap utama: (1) pengumpulan data menggunakan dua dataset resmi BPS 2025 yang mencakup 34 provinsi dan 13 faktor perceraian; (2) pembersihan data (praproses ke dalam format *data_clean.csv*), termasuk eksklusi empat provinsi baru di Papua yang tidak memiliki data tersedia; (3) penyusunan statistik deskriptif untuk melihat rata-rata, median, standar deviasi, dan distribusi per faktor; (4) pengujian Korelasi Pearson untuk mengukur kekuatan hubungan tiap faktor dengan total perceraian; (5) pemodelan Regresi Sederhana dan Berganda untuk evaluasi prediktif; (6) pengujian beda rata-rata perceraian antar kelompok wilayah menggunakan ANOVA *One-Way*; (7) pengujian efek interaksi wilayah dan kategori ekonomi menggunakan ANOVA *Two-Way*; serta (8) interpretasi hasil analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan. Seluruh komputasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan Python dengan pustaka Pandas, NumPy, SciPy, Statsmodels, dan Matplotlib.

2.2 Populasi, Sampel, dan Prosedur Pengumpulan Data

Karena data yang dipakai mencakup keseluruhan 34 provinsi yang datanya lengkap, penelitian ini sebetulnya bukan mengambil sampel, melainkan sensus—unit analisisnya adalah populasi itu sendiri. Instrumennya pun bukan kuesioner atau wawancara, melainkan data sekunder resmi dari BPS. Prosesnya: unduh dua dataset dari portal BPS, gabungkan berdasarkan kode provinsi, cek konsistensi total antar dataset, lalu tangani baris kosong pada provinsi baru di Papua. Seluruh proses ini didokumentasikan dalam skrip Python agar bisa direplikasi, dan hasil akhirnya disimpan sebagai *data_clean.csv*.

2.3 Sumber dan Deskripsi Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder dari dua dataset resmi BPS Republik Indonesia tahun 2025: (1) “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara) 2025”, mencakup 13 faktor penyebab dari 34 provinsi; dan (2) “Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian) 2025”, memuat jumlah nikah, cerai talak, dan cerai gugat per provinsi [1]. Kedua dataset digabung menjadi *data_clean.csv* yang telah melalui proses validasi konsistensi.

Dari 38 baris data awal, empat provinsi baru di Papua (Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan) dieksklusi karena tidak memiliki data perceraian yang dilaporkan (*total_cerai* = 0), sehingga unit analisis akhir berjumlah 34 provinsi. Variabel dependen (Y) adalah total perceraian per provinsi. Tiga belas variabel independen (X_1 – X_{13}) adalah: zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran, kawin paksa, murtad, dan faktor ekonomi.

Tabel 1. Data Perceraian Sepuluh Provinsi Terbanyak Tahun 2025

Provinsi	Jumlah Cerai	Perselisihan	Ekonomi	KDRT
Jawa Barat	98.903	57.845	35.564	605
Jawa Timur	83.208	37.708	35.515	2.053
Jawa Tengah	67.500	36.842	22.399	424
Sumatera Utara	18.844	17.183	268	115

Lampung	16.624	13.081	2.106	184
Banten	15.400	12.134	2.115	248
DKI Jakarta	14.062	10.790	1.821	222
Sulawesi Selatan	13.323	10.574	360	394
Sumatera Selatan	12.058	9.604	960	295
NTB	7.509	5.392	176	184

Sumber: BPS Indonesia, 2025 [1]

2.4 Korelasi Pearson

Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara setiap faktor penyebab (X_i) dengan jumlah perceraian (Y). Koefisien korelasi dihitung dengan persamaan [10]:

$$r = [n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)] / \sqrt{\{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]\}} \dots (1)$$

Nilai r berkisar antara -1 hingga $+1$. Klasifikasi mengacu pada kriteria Guilford: $|r| < 0,2$ (sangat lemah), $0,2-0,4$ (lemah), $0,4-0,7$ (cukup kuat), $0,7-0,9$ (kuat), $\geq 0,9$ (sangat kuat). Uji signifikansi menggunakan uji-t dua arah, $\alpha = 0,05$, $df = n - 2 = 32$ [11].

2.5 Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana diterapkan secara individual pada dua faktor dengan korelasi tertinggi untuk membangun model prediktif dasar. Model dinyatakan sebagai [2][4]:

$$\hat{Y} = a + bX \dots (2)$$

Di mana $\hat{Y}$ adalah prediksi jumlah perceraian, a adalah intercept, b adalah koefisien regresi, dan X adalah variabel independen. Parameter diestimasi dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Kualitas model dievaluasi melalui R^2 dan uji-F beserta p -value-nya.

2.6 Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk memodelkan pengaruh simultan dua prediktor utama yang dipilih berdasarkan korelasi tertinggi: perselisihan dan pertengkaran (X_1) serta faktor ekonomi (X_2). Model berganda dinyatakan sebagai [4][12]:

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \dots (3)$$

Di mana β_0 adalah intercept, β_1 dan β_2 adalah koefisien regresi parsial, dan ε adalah error. Estimasi menggunakan OLS. Evaluasi model meliputi R^2 , Adjusted R^2 , F-statistik, MSE, dan RMSE. Uji-t parsial dilakukan untuk menguji signifikansi masing-masing prediktor [12].

2.7 ANOVA One-Way dan Two-Way

ANOVA One-Way digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata jumlah perceraian antar kelompok wilayah. ANOVA Two-Way menganalisis pengaruh dua faktor kategoris dan interaksinya secara bersamaan. Faktor A: lokasi wilayah (Jawa & Bali vs. Non-Jawa), Faktor B: intensitas faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian (Tinggi: ekonomi > 1.000 kasus; Rendah: ≤ 1.000 kasus). Model ANOVA Two-Way [13][14]:

$$Y_{ik} = \mu + \alpha_i + \beta + (\alpha\beta)_i + \varepsilon_{ik} \dots (4)$$

Di mana μ adalah grand mean, α_i adalah efek utama Faktor A, β adalah efek utama Faktor B, $(\alpha\beta)_i$ adalah efek interaksi, dan ε_{ik} adalah error. Signifikansi diuji pada taraf $\alpha = 0,05$.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan data BPS 2025 yang telah diverifikasi melalui data_clean.csv, total perceraian di Indonesia berjumlah 438.168 perkara dari 34 provinsi. Statistik deskriptif disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Data Perceraian Indonesia Tahun 2025

Statistik	Jumlah Cerai	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Nikah
Total	438.168	91.652	346.516	1.477.210
Rata-rata	12.887	2.695	10.191	43.447
Median	5.303	1.070	4.150	19.028
Std. Deviasi	23.072	5.089	18.059	64.285

Minimum	494	144	335	1.098
Maksimum	98.903	21.281	77.622	292.119

Sumber: BPS Indonesia, 2025 [1]; Hasil Analisis, 2025

Nilai rata-rata perceraian per provinsi sebesar 12.887 kasus, jauh di atas median 5.303 kasus, mengindikasikan distribusi yang sangat miring ke kanan (right-skewed). Standar deviasi yang sangat besar (23.072) mencerminkan kesenjangan ekstrem antar provinsi, dengan selisih antara nilai tertinggi (Jawa Barat: 98.903) dan terendah (NTT: 494) mencapai hampir 200 kali lipat. Dominasi cerai gugat (79,1%) atas cerai talak (20,9%) menunjukkan bahwa perempuan semakin aktif menggunakan hak hukumnya dalam mengakhiri pernikahan—tren yang konsisten dengan temuan penelitian terdahulu [2][3]. Secara faktor dominan, perselisihan dan pertengkaratan terus-menerus menyumbang 282.326 kasus (64,4% dari total), diikuti faktor ekonomi (105.727 kasus, 24,1%).

3.2 Hasil Korelasi Pearson

Tabel 3 menyajikan hasil korelasi Pearson antara 13 faktor penyebab perceraian dengan jumlah total perceraian per provinsi ($n = 34$). Seluruh faktor menunjukkan korelasi positif, artinya semakin tinggi frekuensi suatu faktor di suatu provinsi, semakin tinggi pula angka perceraianya.

Tabel 3. Hasil Korelasi Pearson antara 13 Faktor Penyebab dan Jumlah Perceraian

Faktor Penyebab	r	r ²	Kekuatan Korelasi	p-value
Perselisihan & Pertengkaratan	0,9844	0,9690	Sangat Kuat	< 0,001
Faktor Ekonomi	0,9794	0,9592	Sangat Kuat	< 0,001
Perjudian	0,9502	0,9028	Sangat Kuat	< 0,001
Cacat Badan	0,8943	0,7998	Sangat Kuat	< 0,001
Poligami	0,8691	0,7554	Kuat	< 0,001
Meninggalkan Pihak	0,8667	0,7511	Kuat	< 0,001
Murtad	0,8600	0,7396	Kuat	< 0,001
Dihukum	0,7955	0,6329	Kuat	< 0,001
Penjara	0,7883	0,6214	Kuat	< 0,001
Mabuk	0,7545	0,5693	Kuat	< 0,001
KDRT	0,7545	0,5693	Kuat	< 0,001
Kawin Paksa	0,6727	0,4525	Cukup Kuat	< 0,001
Zina	0,5730	0,3283	Cukup Kuat	< 0,001
Madat	0,3758	0,1412	Lemah	0,028

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Faktor perselisihan dan pertengkaratan terus-menerus memiliki korelasi tertinggi ($r = 0,9844$, $R^2 = 0,9690$, $p < 0,001$). Ini berarti 96,9% variasi jumlah perceraian antar provinsi dapat dijelaskan oleh faktor tunggal ini. Temuan ini selaras dengan Purwaningsih dan Nurelasari (2023) yang menemukan bahwa ketidakharmonisan merupakan faktor paling dominan di Jawa Barat [3]. **Faktor ekonomi** berada di posisi kedua ($r = 0,9794$, $R^2 = 0,9592$), memperkuat temuan Irwan dkk. (2023) yang membuktikan signifikansi ekonomi dengan odds ratio 2,069 [5]. Konsistensi arah hubungan pada dua skala data yang berbeda (kabupaten vs. nasional) memperkuat validitas eksternal faktor ekonomi sebagai prediktor perceraian di Indonesia.

Faktor perjudian menempati posisi ketiga dengan korelasi sangat kuat ($r = 0,9502$), sementara **cacat badan** ($r = 0,8943$) dan **poligami** ($r = 0,8691$) masuk kelompok korelasi kuat. Di sisi lain, madat memiliki korelasi paling lemah ($r = 0,3758$, $R^2 = 0,1412$). Zina ($r = 0,5730$) dan kawin paksa ($r = 0,6727$) menunjukkan korelasi yang lebih rendah, mengindikasikan dampaknya yang lebih bersifat lokal atau tidak dilaporkan secara sistematis, pola yang juga diamati Khairuddin (2024) terkait rendahnya pelaporan faktor-faktor privat, seperti perselingkuhan, dalam kasus perceraian di Indonesia [7].

3.3 Hasil Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana diterapkan pada dua faktor dengan korelasi tertinggi. Untuk model dengan prediktor perselisihan dan pertengkaratan (X_1):

$$\hat{Y} = -2.332,49 + 1,8329 X_1 \quad (R^2 = 0,9690, p < 0,001) \dots (5)$$

Koefisien regresi $\beta = 1,8329$ berarti setiap penambahan satu kasus perselisihan, jumlah perceraian meningkat rata-rata 1,83 kasus. Nilai $R^2 = 0,9690$ menunjukkan model mampu menjelaskan 96,9% variasi data, jauh lebih tinggi dibandingkan model Muhajannah dkk. (2025) yang menghasilkan $R^2 = 0,8774$ untuk hubungan pernikahan-perceraian [2]. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan unit analisis (provinsi vs. kabupaten/kota) dan perbedaan prediktor yang digunakan, yang menunjukkan bahwa perselisihan merupakan prediktor yang lebih langsung dibanding sekadar jumlah pernikahan.

Untuk model dengan prediktor faktor ekonomi (X_2):

$$\hat{Y} = 5.139,07 + 2,4917 X_2 \quad (R^2 = 0,9592, p < 0,001) \dots (6)$$

Koefisien $\beta = 2,4917$ mengindikasikan bahwa setiap tambahan satu kasus perceraian akibat tekanan ekonomi, jumlah total perceraian meningkat rata-rata 2,49 kasus. Intercept positif (5.139,07) mengimplikasikan adanya basis perceraian yang cukup tinggi bahkan tanpa tekanan ekonomi yang dilaporkan. Nilai $R^2 = 0,9592$ sangat tinggi, konsisten dengan dominasi faktor ekonomi dalam literatur perceraian Indonesia [3][5], dan memperkuat argumen bahwa tekanan finansial rumah tangga merupakan salah satu penggerak utama keputusan bercerai secara nasional.

3.4 Hasil Regresi Linear Berganda

Model regresi berganda yang menggabungkan perselisihan (X_1) dan ekonomi (X_2) secara simultan menghasilkan persamaan:

$$\hat{Y} = 732,24 + 1,0140 X_1 + 1,2011 X_2 \quad (R^2 = 0,9985, \text{Adj } R^2 = 0,9984) \dots (7)$$

Tabel 4. Ringkasan Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien (β)	Std. Error	Signifikansi	p-value
Konstanta (intercept)	732,24	—	—	—
Perselisihan & Pertengkar (X ₁)	1,0140	0,0832	Sangat Signifikan	< 0,001
Faktor Ekonomi (X ₂)	1,2011	0,1105	Sangat Signifikan	< 0,001

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Nilai $R^2 = 0,9985$ dan Adjusted $R^2 = 0,9984$ menunjukkan bahwa model berganda mampu menjelaskan 99,85% variasi jumlah perceraian—peningkatan substansial dibandingkan model sederhana. F-statistik = 10.157,05 ($p < 0,001$) membuktikan model secara keseluruhan sangat signifikan. RMSE = 887,27 kasus menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi yang masih dalam batas wajar untuk skala data hingga 98.903 kasus.

Menariknya, ketika keduanya dimodelkan bersama, koefisien parsial $\beta_1 = 1,014$ (perselisihan) sedikit lebih kecil dari $\beta_2 = 1,201$ (ekonomi). Ini menunjukkan bahwa secara parsial—setelah mengontrol variabel lainnya—faktor ekonomi memberikan kontribusi marginal sedikit lebih besar. Kedua koefisien sangat signifikan ($p < 0,001$), memperkuat argumen Samosir dkk. (2021) bahwa regresi berganda memberikan estimasi lebih akurat dibandingkan model sederhana [4]. Temuan ini juga melengkapi hasil regresi logistik Irwan dkk. (2023) yang hanya menguji signifikansi ekonomi secara parsial dengan odds ratio [5]; di sini terlihat bahwa besaran pengaruh ekonomi bahkan sedikit melampaui perselisihan setelah dikontrol bersama, nuansa yang tidak tertangkap pada model regresi tunggal maupun regresi logistik biner.

3.5 Hasil ANOVA One-Way

ANOVA One-Way dilakukan untuk menguji perbedaan rata-rata jumlah perceraian antar lima kelompok wilayah berdasarkan data_clean.csv.

Tabel 5. Hasil ANOVA One-Way Berdasarkan Kelompok Wilayah

Wilayah	Rata-rata Cerai	Min	Max	F-statistic	p-value
Jawa & Bali	40.769	1.110	98.903	4,8451	0,004
Sumatera	8.762	2.347	18.844		
Kalimantan	4.920	1.154	7.174		
Sulawesi	4.760	1.464	13.323		
Maluku,					
NTT &	2.000	494	7.509		
Papua					

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil ANOVA One-Way menghasilkan $F = 4,8451$ dengan $p\text{-value} = 0,004$ ($\alpha = 0,05$), sehingga H_0 ditolak. Terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik antara setidaknya dua kelompok wilayah. Kelompok Jawa & Bali memiliki rata-rata tertinggi (40.769 kasus per provinsi), didorong terutama oleh Jawa Barat (98.903 kasus) dan Jawa Timur (83.208 kasus).

Perbedaan antar wilayah yang signifikan ini dapat dijelaskan oleh tiga faktor utama: (1) kepadatan penduduk dan volume pernikahan yang jauh lebih tinggi di Jawa; (2) tekanan ekonomi perkotaan dan urbanisasi yang lebih intens; serta (3) aksesibilitas pengadilan agama yang lebih baik di Jawa, mendorong formalisasi perceraian yang lebih tinggi. Temuan ini konsisten dengan identifikasi outlier pada kabupaten-kabupaten berpenduduk besar oleh Muhajannah dkk. (2025) [2], hanya saja penelitian ini melihatnya pada skala provinsi secara nasional. Pola ini juga sejalan dengan Wowor (2021) terkait akses layanan hukum keluarga pada kasus perceraian usia muda [15]: makin mudah akses ke pengadilan agama, makin banyak kasus yang tercatat resmi.

3.6 Hasil ANOVA Two-Way

ANOVA Two-Way dilakukan untuk menganalisis pengaruh wilayah (Jawa vs. Non-Jawa) dan intensitas faktor ekonomi (Tinggi/Rendah) secara bersamaan beserta efek interaksinya.

Tabel 6. Hasil ANOVA Two-Way (Wilayah $\times$ Kategori Ekonomi)

Sumber Variasi	Sum of Squares	df	F-statistic	p-value
Faktor A – Wilayah (Jawa/Non-Jawa)	308.166.128,75	1	1,395	0,247
Faktor B – Ekonomi (Tinggi/Rendah)	3.106.395.148,39	1	14,061	0,001
Interaksi A $\times$ B	979.794.723,48	1	4,435	0,044
Error (Within)	—	30	—	—

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Faktor B (ekonomi) terbukti signifikan ($F = 14,061$, $p = 0,001$), menunjukkan bahwa intensitas tekanan ekonomi berpengaruh nyata terhadap jumlah perceraian. Provinsi dengan faktor ekonomi tinggi (> 1.000 kasus) rata-rata memiliki 55.839 kasus perceraian, berbanding 5.028 kasus untuk kategori ekonomi rendah—selisih hampir sebelas kali lipat. Sementara itu, Faktor A (wilayah) tidak signifikan secara mandiri ($F = 1,395$, $p = 0,247$), yang mengindikasikan bahwa perbedaan wilayah Jawa vs. Non-Jawa tidak cukup untuk menjelaskan variasi perceraian secara tersendiri tanpa mempertimbangkan faktor lainnya.

Efek interaksi A $\times$ B signifikan ($F = 4,435$, $p = 0,044$), mengindikasikan bahwa pengaruh tekanan ekonomi terhadap perceraian tidak bersifat seragam di semua wilayah—terdapat efek sinergistik antara lokasi wilayah dan intensitas faktor ekonomi. Artinya, dampak tekanan ekonomi terhadap angka perceraian berbeda antara provinsi-provinsi Jawa & Bali dibandingkan dengan Non-Jawa. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan penting: intervensi berbasis ekonomi perlu dirancang secara spesifik sesuai karakteristik wilayah, bukan diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia. Temuan interaksi yang signifikan ini memiliki makna substantif yang penting. Di wilayah Jawa & Bali, konsentrasi penduduk yang tinggi bersamaan dengan tekanan ekonomi menciptakan kondisi di mana jumlah perceraian melonjak secara tidak proporsional dibandingkan wilayah lain dengan tingkat tekanan ekonomi serupa. Hal ini sejalan dengan temuan Purwaningsih dan Nurelasari (2023) yang menunjukkan bahwa ketidakharmonisan dan masalah ekonomi mendominasi kluster perceraian di Jawa Barat [3]. Di sisi lain, provinsi-provinsi Non-Jawa dengan tekanan ekonomi tinggi seperti Sulawesi Selatan menunjukkan pola yang berbeda, di mana faktor ekonomi berdampak lebih moderat terhadap total perceraian—kemungkinan karena kuatnya peran jaringan sosial dan keluarga besar dalam menopang stabilitas rumah tangga [5]. Perlu dicatat bahwa meskipun Faktor A (wilayah) tidak signifikan secara mandiri, hal tersebut tidak berarti perbedaan antarwilayah tidak ada. Rata-rata perceraian di Jawa & Bali (40.769 kasus) tetap jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, namun variabilitas dalam kelompok tersebut juga sangat besar sehingga efek utamanya tidak mencapai signifikansi statistik pada taraf $\alpha = 0,05$. Ketika efek wilayah dianalisis bersama efek ekonomi dalam model interaksi, barulah pola perbedaannya menjadi nyata ($p = 0,044$). Ini menggarisbawahi pentingnya analisis multifaktor dibandingkan analisis satu faktor dalam memahami fenomena sosial yang kompleks seperti perceraian. Secara keseluruhan, hasil ANOVA Two-Way mendukung pendekatan kebijakan yang tersegmentasi. Pemerintah pusat dan daerah perlu mempertimbangkan konteks wilayah dalam merancang program pencegahan perceraian, khususnya program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga. Program yang efektif di provinsi-provinsi Jawa dengan karakteristik urban padat belum tentu memberikan dampak yang sama di provinsi-provinsi luar Jawa yang memiliki struktur sosial dan ekonomi berbeda [10][11]. Selain itu, rendahnya angka

perceraian di wilayah Maluku, NTT, dan Papua tidak semata-mata mencerminkan kondisi pernikahan yang lebih stabil, melainkan juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses masyarakat ke pengadilan agama serta tingkat kesadaran hukum yang masih perlu ditingkatkan di wilayah-wilayah tersebut [16]. Dengan demikian, interpretasi data perceraian antarprovinsial perlu mempertimbangkan faktor aksesibilitas layanan hukum sebagai variabel kontekstual yang penting. Temuan ini memperkuat urgensi penelitian lanjutan yang memasukkan variabel akses layanan hukum dan kepadatan penduduk sebagai kovariat dalam model analisis perceraian tingkat nasional.

3.7 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan seluruh temuan analisis statistik, penelitian ini merumuskan empat rekomendasi kebijakan utama.

- a. **Program Mediasi dan Konseling Pernikahan Berbasis KUA.** Mengingat perselisihan merupakan faktor paling dominan ($r = 0,9844$), Kementerian Agama perlu memperkuat dan menstandarisasi program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) pra-nikah di seluruh KUA, termasuk sesi resolusi konflik dan komunikasi efektif pasangan. Program konseling pasca-nikah berbasis komunitas juga perlu diperluas, khususnya di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang mencatat volume perceraian tertinggi [2].
- b. **Penguatan Ekonomi Keluarga Terintegrasi.** Faktor ekonomi sebagai prediktor kedua terkuat ($r = 0,9794$) mengindikasikan perlunya sinergi antara program perlindungan sosial (PKH, BLT) dengan edukasi pengelolaan keuangan rumah tangga. Program pelatihan kewirausahaan bagi pasangan muda dan skema kredit mikro yang dapat diakses keluarga rentan dapat menjadi intervensi efektif secara nasional [5].
- c. **Penanganan KDRT Multisektor.** Dengan 7.138 kasus KDRT tercatat sebagai penyebab perceraian ($r = 0,755$), pemerintah perlu memastikan akses merata terhadap layanan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), memperkuat sistem pelaporan aman, dan meningkatkan literasi masyarakat tentang hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.
- d. **Strategi Kewilayahan Berbasis Data.** Hasil ANOVA One-Way ($F = 4,85$, $p = 0,004$) dan ANOVA Two-Way (interaksi $A \times B$ signifikan, $F = 4,435$, $p = 0,044$) mengindikasikan perlunya strategi yang disesuaikan per wilayah: provinsi-provinsi Jawa memerlukan intervensi skala masif dengan sumber daya lebih besar, sementara wilayah Maluku dan Papua lebih membutuhkan penguatan infrastruktur pengadilan agama, layanan konseling jarak jauh (telemedis), dan peningkatan kesadaran hukum pernikahan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor dominan penyebab perceraian di 34 provinsi Indonesia menggunakan data BPS 2025, sekaligus memetakan pola distribusinya antar wilayah. Dari seluruh analisis yang dilakukan, terdapat empat temuan utama.

1. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta faktor ekonomi terbukti sebagai dua prediktor perceraian paling dominan di 34 provinsi Indonesia, dengan korelasi yang sangat kuat secara individual maupun ketika dimodelkan bersama melalui regresi berganda (lihat bagian 3.2 dan 3.4 untuk rincian angkanya).
2. Model regresi sederhana untuk masing-masing faktor menunjukkan kekuatan prediktif yang tinggi dan dapat dijadikan alat estimasi awal jumlah perceraian berbasis faktor dominan.
3. ANOVA One-Way dan Two-Way mengonfirmasi adanya perbedaan pola perceraian yang signifikan antarwilayah, dengan wilayah Jawa & Bali secara konsisten mencatat angka tertinggi (lihat bagian 3.5 dan 3.6 untuk rincian angkanya).
4. Ditemukan efek interaksi yang signifikan antara wilayah dan intensitas faktor ekonomi, yang berarti pengaruh tekanan ekonomi terhadap perceraian tidak seragam di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, program intervensi berbasis ekonomi perlu dirancang secara spesifik sesuai karakteristik masing-masing wilayah, bukan pendekatan tunggal yang seragam secara nasional.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui: (1) data dianalisis pada tingkat provinsi sehingga variasi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi tidak tertangkap; (2) empat provinsi baru di Papua tidak dapat diikutsertakan karena data perceraianya tidak tersedia; dan (3) analisis bersifat cross-sectional sehingga tidak bisa digunakan untuk menarik kesimpulan sebab-akibat. Ke depannya, penelitian serupa disarankan menggunakan data panel multi-tahun, mempertimbangkan variabel

sosiodemografi seperti usia pernikahan, tingkat pendidikan, dan urbanisasi, serta mengeksplorasi pendekatan model spasial atau machine learning untuk analisis yang lebih mendalam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia atas ketersediaan data publik yang menjadi fondasi penelitian ini, kepada dosen pembimbing atas arahan dan bimbingan akademis yang berharga, serta kepada seluruh anggota tim kelompok 6 atas kolaborasi dan dedikasi selama proses penelitian berlangsung.

REFERENCES

- [1] Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara) 2025” dan “Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian) 2025,” BPS Republik Indonesia, Jakarta, 2025.
- [2] S. Muhajannah, A. R. Kadisi, dan N. Wakhidah, “Penerapan Regresi Linear Terhadap Tingkat Perceraian Di Jawa Tengah Menggunakan Bahasa Python,” *Jurnal TEKNO KOMPAK*, vol. 19, no. 2, hal. 76–90, 2025.
- [3] E. Purwaningsih dan E. Nurelasari, “Implementasi Metode K-Means Clustering Dengan Davies Bouldin Index Pada Analisis Faktor Penyebab Perceraian,” vol. 7, no. 2, hal. 134–143, 2023.
- [4] R. A. Samosir, M. F. Rozy, dan A. P. Windarto, “Penerapan Algoritma Regresi Linier Berganda dalam Mengestimasi Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Simalungun,” vol. 2, no. 1, hal. 16–20, 2021.
- [5] M. Irwan, R. Iknas, dan N. Azisa, “Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Pinrang Menggunakan Metode Regresi Logistik,” *Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya*, vol. 11, no. 1, hal. 113–117, 2023.
- [6] N. S. Manna, S. Doriza, dan M. Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, vol. 6, no. 1, hal. 11, 2021, doi: [10.36722/sh.v6i1.443](https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443).
- [7] K. Khairuddin, “Fenomena Tren Perceraian di Indonesia: Apa Penyebabnya?,” *Abdurrauf Science and Society*, vol. 1, no. 1, hal. 1–8, 2024, doi: [10.70742/asoc.v1i1.95](https://doi.org/10.70742/asoc.v1i1.95).
- [8] T. U. Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas,” vol. 14, no. 1, 2021.
- [9] Windarman, Sapri, dan E. Suryana, “Implementation of the Naïve Bayes Algorithm for Divorce Prediction at the Tais Religious Court,” vol. 2, no. 2, hal. 501–510, 2022.
- [10] W. McKinney, *Python for Data Analysis*, 2nd ed. O’Reilly Media, 2018.
- [11] S. Raschka, J. Patterson, dan C. Nolet, “Machine Learning in Python: Main Developments and Technology Trends,” *Information*, vol. 11, no. 4, doi: 10.3390/info11040193, 2020.
- [12] N. Suhandi, E. A. K. Putri, dan S. Agnisa, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linear di Kota Palembang,” vol. 9, no. 2, hal. 77–82, 2018.
- [13] Y. Aryani dan D. Gustian, “Sistem Informasi Penjualan Barang dengan Metode Regresi Linier Berganda,” vol. 2, no. 2, 2020.
- [14] L. S. Febrianto, N. K. Dwiyantri, dan P. Hendikawati, “Perbandingan Metode Robust LMS dan Penduga S untuk Menangani Outlier pada Regresi Linier Berganda,” vol. 7, no. 1, hal. 83–95, 2018.
- [15] J. S. Wowor, “Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini),” *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, vol. 2, no. 5, hal. 814–820, 2021, doi: [10.59141/jiss.v2i05.278](https://doi.org/10.59141/jiss.v2i05.278).
- [16] Nur’eni dan L. Handayani, “Regresi Probit untuk Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Perceraian di Sulawesi Tengah,” hal. 13–22, 2016.
- [17] N. Januari, “Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia,” vol. 3, no. 3, hal. 120–130, 2023.
- [18] U. D. Rahayu, N. L. Chusna, dan M. Fachri, “Analisis Kasus Perceraian Pada Pengadilan Negeri Bekasi Menggunakan Algoritma K-Means Clustering,” vol. 6, no. 1, hal. 165–172, 2022.